



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NOVIYA SYAHRIANI SYAM
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 197263

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **885.000.000**

1. Tanah Seluas 396 m2 di LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. Tanah Seluas 224 m2 di LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 2925 m2/180 m2 di LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 675.000.000
4. Tanah Seluas 1900 m2 di LUWU TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 45.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **288.000.000**

1. MOBIL, KIA SELTOS 1,4 A/T Tahun 2020, HADIAH Rp. 280.000.000
2. MOTOR, HONDA F1C02N46LO A/T Tahun 2021, HADIAH Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **89.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **92.166.293**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **1.354.166.293**

III. HUTANG **Rp.** **5.233.489**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **1.348.932.804**

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.